

Pemberdayaan UMKM oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan

Melsa Ranika

Universitas Riau

melsaranika.ginting00@gmail.com

Mayarni Mayarni

Universitas Riau

mayarni@lecturer.unri.ac.id

Alamat: Kampus Bina Widya, Jl. HR. Soebrantas Panam No.KM. 12.5,
Simpang Baru, Panam, Kota Pekanbaru, Riau 28293

Korespondensi penulis; melsaranika.ginting00@gmail.com

Abstract. *Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) have a crucial role in the economic dynamics of a region. MSMEs are not only a source of job creation, but also have great potential to encourage inclusive economic growth. Empowering MSMEs is a strategic key to optimizing the contribution of MSMEs to the economy. This involves various efforts, such as education and training to improve the skills of MSME entrepreneurs, easier access to financial resources, and support in marketing and product promotion. There are obstacles in empowering MSMEs in Pelalawan Regency, namely that the Human Resources (HR) owned by the department are inadequate, so they are less effective in empowering MSMEs in Pelalawan Regency. Lack of government budget to empower MSMEs. The aim of this research is to find out how the Department of Cooperatives, SMEs, Industry and Trade attempts to empower MSMEs in Pelalawan Regency. The theory used is the Stages of Empowerment by Ambar firm. S. (2013:162). The research method uses qualitative methods with a descriptive approach. The results of this research are the Department of Cooperatives, SMEs, Industry and Trade, Kab. Pelalawan has made efforts in several aspects, community empowerment, but it is still not optimal. The research recommendation is that it is hoped that empowerment parties will be more active and more innovative in the future to maintain this empowerment achievement.*

Keywords: *Empowerment, HR, MSMEs*

Abstrak. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran krusial dalam dinamika ekonomi suatu daerah. UMKM tidak hanya menjadi sumber penciptaan lapangan kerja, tetapi juga menyimpan potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara inklusif. Pemberdayaan UMKM menjadi kunci strategis untuk mengoptimalkan kontribusi UMKM dalam perekonomian. Ini melibatkan berbagai upaya, seperti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pengusaha UMKM, akses lebih mudah ke sumber daya keuangan, dan dukungan dalam pemasaran dan promosi produk. Terdapat kendala dalam pemberdayaan UMKM Kabupaten pelalawan yaitu Sumber daya Manusia (SDM) yang dimiliki dinas kurang memadai, sehingga kurang efektif dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Pelalawan. Kurangnya anggaran pemerintah untuk melakukan pemberdayaan UMKM. Tujuan penelitian ini mengetahui bagaimana upaya Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan perdagangan dalam memberdayakan UMKM di Kabupaten Pelalawan Teori yang digunakan yaitu Tahapan-tahapan dalam Pemberdayaan oleh Ambar teguh. S. (2013:162). Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan perdagangan Kab. Pelalawan telah melakukan upaya di beberapa aspek, pemberdayaan masyarakat namun masih belum maksimal. Rekomendasi penelitian yaitu diharapkan pihak pemberdayaan kedepannya lebih giat dan lebih berinovasi untuk mempertahankan capaian pemberdayaan ini.

Kata Kunci: Pemberdayaan, SDM, UMKM

LATAR BELAKANG

Pemerintah daerah Pelalawan, bersama dengan berbagai lembaga dan organisasi pendukung UMKM, telah aktif dalam memberikan dukungan dan pelatihan kepada para pelaku usaha kecil. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pengusaha, meningkatkan akses terhadap pasar, dan memfasilitasi permodalan agar UMKM dapat tumbuh dan bersaing secara berkelanjutan. Dengan demikian, UMKM di Kabupaten Pelalawan tidak hanya menjadi pendorong utama ekonomi lokal, tetapi juga menjadi elemen penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Keberlanjutan dan pengembangan UMKM di daerah ini menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat fondasi ekonomi daerah Provinsi Riau secara keseluruhan.

Secara umum permasalahan UMKM yang terjadi dalam mengembangkan usahanya adalah kurangnya pembinaan, informasi, aksesibilitas yang dilakukan pemerintah setempat atau terkadang dalam memperoleh modal dari Bank mereka mengalami kesulitan, penyebabnya adalah tingkat suku bunga kredit yang tinggi dan diperlukannya jaminan kebendaan dalam memperoleh kredit yang sulit mereka penuhi. Selain itu permasalahan yang dialami oleh UMKM adalah teknik produksi, pemasaran, manajemen dan teknologi, begitu pula dengan UMKM yang terdapat pada Kabupaten Pelalawan Fenomena yang terjadi pada penelitian ini yaitu *Pertama*, Rendahnya kualitas pengetahuan sumber daya manusia dalam berlaku usaha. Hal ini disebabkan karna kurangnya pelatihan yang diberikan dari dinas dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Pelalawan. *Kedua*, belum adanya kesiapan dari pelaku usaha untuk menghadapi pasar bebas. Permasalahan ini mengenai kuangnya inovasi kualitas produk yang dihasilkan dan pengetahuan teknologi yang masih minim menjadi kendala bagi UMKM untuk memasarkan produk. *Ketiga*, kurangnya permodalan dan terbatasnya akses biaya. Hal ini terkendala karena sulitnya memperoleh pinjaman dari penyalur dana dikarenakan persyaratan administrasi yang sulit.

KAJIAN TEORITIS

1. Pemberdayaan

Menurut **sulistiyani (2004:77)** menjelaskan bahwa secara etimologis, pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Berdasarkan pengertian tersebut, selanjutnya pemberdayaan merupakan proses pemberian daya, kekuatan dan kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang berdaya.

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan aau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasu, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (**Edi Suharto 2014:59-60**).

2. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah usaha yang dimiliki orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang produktif dan memenuhi kriteria yang ditulis oleh Undang-Undang. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan usaha yang dijalankan oleh perorangan maupun kelompok yang memenuhi syarat sebagai usaha mikro yang memiliki peran yang sangat penting bagi negara baik untuk perekonomian bagi masyarakat maupun bagi negara. Dengan menggunakan kriteria kewirausahaan.

3. Pemberdayaan UMKM Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di suatu daerah memerlukan pendekatan holistik dan terpadu untuk memastikan dampak yang signifikan. Langkah pertama adalah memberikan akses yang lebih mudah kepada pemilik UMKM terhadap pendidikan dan pelatihan yang mendalam, memberikan mereka keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola usaha dengan efektif. Adapun proses yang dilakukan dalam upaya pemberdayaan UMKM di Kabupaten Pelalawan adalah melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku

Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Tahap ini merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan. Pada tahap ini pihak pemberdaya/aktor/pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Sentuhan penyadaran akan lebih

- membuka keinginan dan kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.
2. Tahap transformasi pengetahuan berupa wawasan dan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat berlangsung dengan baik, penuh semangat dan berjalan dengan efektif jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan tuntutan kebutuhan. Pada tahap ini masyarakat memberikan partisipasi pada tingkat yang rendah yaitu sekedar menjadi subjek dalam pembangunan.
 3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Tahap ini merupakan tahap pengayaan atau peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan yang diperlukan supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi dan melakukan inovasi-inovasi dalam lingkungannya.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah atau teknik yang digunakan demi memperoleh data mengenai suatu objek dari penelitian yang memiliki tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang suatu gejala data-data dan informasi yang berdasarkan pada fakta yang diperoleh dari lapangan mengenai Strategi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Pelalawan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemberdayaan UMKM Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa pelaku UMKM kebanyakan kurang memiliki kemampuan dalam hal manajemen keuangan. Karena biasanya berbasis bisnis keluarga, tidak jarang pengelolaan keuangan pelaku UMKM dicampur aduk, serta tanpa ada pemisahan antara keuangan pribadi dengan keuangan usahanya. Kebanyakan dari pelaku UMKM sering berpikir karena usaha mereka masih kecil, maka tidak masalah

mereka mencampur uang usaha mereka dengan uang pribadi. Padahal ini merupakan suatu kesalahan dalam menjalankan suatu usaha.

Manajemen keuangan merupakan hal yang sangat penting. Meskipun usaha yang dikelola masih skala mikro, kecil maupun menengah, namun pelaku UMKM hendaknya menerapkan manajemen keuangan yang baik sejak awal usahanya. Dengan memiliki manajemen keuangan yang baik, maka akan mudah bagi pelaku UMKM untuk mengontrol keuangannya. Selain itu, pelaku UMKM tidak akan kesulitan ketika mengajukan pinjaman kepada lembaga pendanaan sektor formal seperti perbankan.

B. Sumber daya manusia yang dimiliki dinas kurang memadai, sehingga kurang efektif dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Pelalawan.

UMKM sebagai salah satu sektor usaha yang sangat bergantung kepada keberadaan manusia. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu program. SDM memegang peranan penting dalam suatu instansi/perusahaan, potensi kualitas dan keterampilan harus dimiliki. Keterbatasan jumlah SDM yang dimiliki Dinas, mengalami kesulitan dalam membantu memberdayakan pelaku UMKM yang jumlahnya cukup banyak” SDM baik dari segi pendidikan maupun keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya. Sehingga usaha tersebut sulit berkembang dengan optimal. Kurangnya anggaran pemerintah untuk melakukan pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan menjadi kunci strategis untuk mengoptimalkan kontribusi UMKM dalam perekonomian. Ini melibatkan berbagai upaya, seperti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan UMKM. Untuk memberikan pemberdayaan UMKM berupa pendidikan dan pelatihan, pemerintah mendatangkan konsultan ahli seperti dosen, pelaku usaha/owner. Dengan mendatangkan konsultan ahli tersebut dibutuhkan biaya pelatihan yang tidak kecil. Dikarenakan kurangnya anggaran dari pemerintah pelatihan tidak bisa dilakukan secara efektif dan berkelanjutan. Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui, pemberdayaan UMKM berupa pendidikan dan pelatihan dengan mendatangkan konsultan ahli tidak berjalan dengan efektif karna kurangnya biaya. Pemberian pelatihan kepada UMKM hanya dilakukan alakadarnya. Sebaiknya pelatihan tersebut dilakukan dengan konsisten agar pemberdayaan UMKM berjalan dengan efektif

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM Kabupaten Pelalawan dalam Pemberdayaan UMKM yaitu memberikan Tahap Penyadaran dan Pembentukan Perilaku, dengan melakukan penyuluhan, memberikan pendidikan motivasi yang membangkitkan kesadaran akan potensi pelaku UMKM. Hal ini dilakukan dengan memberikan pelatihan berupa pendidikan yang mendatangkan langsung konsultan ahli atau pemilik usaha/owner. Disamping itu juga, dinas memiliki layanan berupa PLUT-KUMKM (Pusat Layanan Terpadu-Koperasi Usaha Kecil Menengah) bertujuan untuk menjadi pusat layanan yang mendukung perkembangan dan bertumbuhan UMKM. Selanjutnya pada tahap transformasi Kemampuan diharapkan akan menjalani proses belajar mengenai pengetahuan apa saja yang dibutuhkan dalam mengembangkan usahanya. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan melakukan kegiatan pelatihan berupa cara mengakses pasar dengan jangkauan yang luas dan pentingnya perizinan usaha bagi pelaku UMKM.

Tahap Peningkatan Kemampuan intelektual yang dilaksanakan untuk membentuk inisiatif dan kemampuan inovatif mengantarkan pada kemandirian. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan disini berperan sebagai perantara menghubungkan antara pelaku UMKM kepada penyalur dana. Diharapkan bantuan pinjaman modal tersebut dapat mengantarkan para pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya dan dapat melakukan inovasi-inovasi dalam usahanya. Faktor penghambat pemberdayaan UMKM dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan yaitu pertama, Sumber Daya Manusia yang dimiliki dinas masih kurang memadai, sehingga kurang efektif dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Pelalawan. Kedua, kurangnya anggaran pemerintah untuk melakukan Pemberdayaan UMKM.

2. Saran

- a. Upaya yang harus dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan adalah memperluas jangkauannya ke masyarakat dengan cara terjun langsung ke masyarakat untuk menemukan permasalahan yang sebenarnya terjadi di masyarakat khususnya pelaku usaha ataupun dengan melakukan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar mau berkonsultasi ke klinik Konsultasi PLUT-KUMKM yang ada di Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan.

- b. Pihak Pemberdayaan kedepannya untuk lebih giat lagi dan lebih berinovasi untuk mempertahankan capaian pemberdayaan ini.
- c. Pemerintah Kabupaten Pelalawan khususnya Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan harus mendukung produk hasil pelaku UMKM dengan ikut terlibat dalam penggunaan dan pembelian produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM. Pemerintah harusnya memberikan kesempatan yang luas bagi pelaku UMKM dengan membeli dan menggunakan produk dari pelaku UMKM di setiap kegiatannya seperti rapat-rapat dinas, evenet-event yang diselenggarakan dinas dan kegiatan dinas lainnya. Ini merupakan suatu bentuk dukungan pemerintah terhadap pelaku UMKM dalam menjalankan bisnisnya.

DAFTAR REFERENSI

- Abu Huraerah. (2008). *Pengorganisasian dan pengembangan masyarakat: Modal dan strategi pembangunan berbasis kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Adi, F. (2014). *Pengantar kesejahteraan sosial*. Bandung: Rafika Aditama.
- Adi, R. (2010). *Metodologi penelitian sosial dan hukum*. Jakarta: Granit.
- Ambar, T. S. (2004). *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Anwas, O. M. (2013). *Pemberdayaan masyarakat di era global*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Balqis, F. (2021). Strategi pemberdayaan masyarakat melalui usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) oleh Dinas Koperasi UKM Kota Pekanbaru. *Jom Fisip*, 6.
- Fernando, F. (2023). Pemberdayaan pelaku usaha mikro oleh Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Pekanbaru. *JRP*, 1(3).
- Gunawan, I. (2013). *Metode penelitian kualitatif: Teori dan praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ichsan, M. (2022). Peran pemerintah dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah pada masa pandemi COVID-19 (Studi di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung). Retrieved from <http://digilib.unila.ac.id/65561/>
- Irfan, M. (2022). Pemberdayaan ekonomi pelaku usaha UMKM melalui bantuan modal Bank Syariah Indonesia KC Parepare. Retrieved from <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3365/>
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2013). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Matthews, B., & Huberman, M. (1992). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: UP.

- Noor, M. K. (2023). Strategi pemberdayaan masyarakat pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok. Retrieved from <http://repository.unas.ac.id/8343/>
- Poerwono. (2013). *Manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan*, Edisi ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kualitatif: Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2014). *Membangun masyarakat, memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sulistiyani, A. T. (2004). *Kemitraan dan modul-modul pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sumiyati, & Suryadi, E. (2017). Model penyaluran dana (financing) dalam optimalisasi pengembangan UMKM di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen Motivasi*, 13(2), 868–881.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.